



---

## **PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Yeni Sapridawati, Novita Indrawati, Azhari Sofyan, Zirman

Universitas Riau

Email: [sepridawati90@gmail.com](mailto:sepridawati90@gmail.com)

---

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine and analyze the effect of inflation and the rupiah exchange rate on the receipt of Value Added Tax (VAT). This research was conducted at the Tax Service Office (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan with an observation year of 2015-2019. The data used in this research is monthly data so that 60 observations are obtained. Methods of data analysis using multiple regression analysis. The results of the study prove that inflation and the rupiah exchange rate have a significant effect on the acceptance of Value Added Tax (VAT).*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan dengan tahun amatan tahun 2015-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan sehingga diperoleh sebanyak 60 pengamatan. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian membuktikan inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertmbahan Nilai (PPN).

Kata Kunci: Inflasi, Nilai tukar rupiah, Penerimaan PPN

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Suatu instansi tidak selalu berjalan dengan baik dalam pelaksanaan kegiatannya, begitu juga yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Dari data yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan dapat dilihat target dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada tahun 2017-2019, sebagaimana terdapat pada Tabel 1.

**Tabel 1**

**Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 2017-2019.**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	414.318.649.000	440.537.980.519	106,32%
2018	502.887.685.000	439.927.154.004	87,48%
2019	566.671.708.000	451.821.945.761	79,73%

**Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan.**

Berdasarkan Tabel 1, realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk tahun 2017 mencapai target, namun tahun 2018 dan 2019 realisasi PPN dan PPnBM tidak mencapai target. Maka tinjauan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sangat dibutuhkan, sehingga pada tahun berikutnya penerimaan PPN dan PPnBM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan bisa terealisasi secara maksimal sesuai dengan target yang diterapkan.

Ketidakseimbangan ekonomi makro dan tingkat aktivitas ekonomi merupakan faktor atau penggerak utama elastisitas pajak atau penerimaan pajak, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran ekonomi terdapat indikator ekonomi makro yang harus dijaga seperti inflasi, dan nilai tukar kurs (Purba, 2015). Almira (2016) menunjukkan bahwa secara parsial Nilai Tukar Rupiah berpengaruh secara negatif terhadap Penerimaan PPN. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Utari (2008) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN.

Disebutkan bahwa penerimaan pajak masih menjadi sumber pendapatan negara. Lebih dari 80% pendapatan RI disumbang oleh pajak. Target penerimaan pajak tahun kemarin dipatok sebesar Rp 1.577,6 triliun di APBN 2019. Namun realisasi sementara hingga akhir tahun hanya mencapai Rp 1.332,1 triliun saja atau 84,4%. Realisasi sementara penerimaan pajak tahun 2019 juga melorot dibanding tahun lalu. Pada 2018 capaian realisasi penerimaan pajak mencapai 92,2% dari APBN. Penerimaan pajak tumbuh 1,4% dibanding tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan itu tentunya sangat minimalis jika



dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang tumbuh hingga 14,1% dari empat jenis pajak yang dipungut pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) serta Pajak Penghasilan Migas (PPH Migas) realisasinya mengecewakan. Capaian PPN & PPnBM tahun 2019 tercatat hanya Rp 532,9 triliun atau 81,3% dari APBN. Angka tersebut lebih rendah dibanding tahun lalu yang realisasinya mencapai Rp 537,3 triliun. Itu artinya realisasi sementara PPN & PPnBM mengalami kontraksi 0,8% dibanding tahun lalu.

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Teori Keynes, adalah konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori pertumbuhan ekonomi Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Teori pertumbuhan ekonomi Keynes menunjukkan perubahan nilai tukar dengan pertumbuhan ekonomi bersifat *uncertainty* (tidak pasti). Keynes mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada pertumbuhan ekonomi dapat langsung lewat beberapa saluran, perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. sehingga didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut. Tingkat inflasi berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek pertumbuhan ekonomi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif.



## 2.2 Pajak

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah: "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (Setiawan, 2013). Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2016), Pajak adalah: iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipaksakan berdasarkan Undang-undang dan tidak mendapat imbalan langsung.

## 2.3 Inflasi

Inflasi seringkali dikaitkan dengan suatu kondisi ekonomi pada saat harga barang-barang melambung tinggi. Menurut Boediono (1994:155) definisi singkat dari Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Menurut Abimanyu (2014) inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus. Sedangkan Sukirno (2014) memberikan definisi inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya.

Dari pengertian-pengertian diatas, suatu kondisi dapat dikatakan mengalami inflasi jika memenuhi beberapa kriteria yaitu; kenaikan harga, bersifat umum, dan secara terus menerus. sedangkan kenaikan harga barang secara sporadis dan sementara tidak dapat disebut inflasi. Adapun perbandingan antara persentasi kenaikan harga-harga pada suatu periode tertentu dengan periode sebelumnya disebut dengan tingkat inflasi. Stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Wahyudi, 2009:211).

Inflasi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Sukirno (2014) menggolongkan inflasi berdasarkan parah atau tidaknya inflasi tersebut yaitu:



1. Inflasi ringan, yaitu tingka inflasi dibawah 10% (sepuluh persen) pertahun.
2. Inflasi sedang, yaitu tingkat inflasi antara 10% (sepuluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) per tahun.
3. Inflasi berat, yaitu tingkat inflasi antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) per tahun.
4. Hiperinflasi, yaitu tingkat inflasi diatas 100% (seratus persen) per tahun.

Adapun jika dilihat dari faktor-faktor penyebab timbulnya inflasi, maka inflasi dapat dibedakan menjadi demand full inflastion dan cost push inflation.

#### 1. *Demand Full Inflation*

Inflasi ini disebabkan oleh bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Sesuai dengan hukum permintaan, meningkatnya jumlah permintaan terhadap faktor produksi mengakibatkan kenaikan harga pada faktor produksi tersebut.

#### 2. *Cost Push Inflation*

Merupakan kebalikan dari *demand full inflation*, dimana kenaikan harga disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang mengakibatkan harga-harga produk yang dihasilkan ikut naik. Kenaikan ongkos produksi dapat terjadi karena tuntutan kenaikan upah tenaga kerja (*wages push inflation*) atau keinginan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan. Berdasarkan asal timbulnya inflasi, inflasi dapat dikategorikan menjadi inflasi dari dalam negeri (*domestic inflation*) dan inflasi dari luar negeri (*imported inflation*).

Inflasi yang bersumber dari dalam negeri, dapat terjadi karena faktor-faktor ekonomi didalam negeri seperti; pencetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan kebijakan defisit anggaran. Sedangkan sumber inflasi dari luar negeri dapat berupa efek dari kenaikan harga-harga barang di luar negeri yang merupakan komoditas perdagangan bebas.

Menurut Murni (2006:41), laju inflasi adalah laju tingkat harga umum dari tahun ke tahun dan biasanya diikuti dengan kenaikan harga pada tahun tertentu dari tahun sebelumnya. Laju atau tingkat inflasi dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100$$

Keterangan :

IHK<sub>t</sub> = Index harga konsumen tahun tertentu

IHK<sub>(t-1)</sub> = Index harga konsumen tahun sebelumnya

Indeks Harga Konsumen (IHK) atau (*consumer price index-CPI*) mengukur biaya sekelompok barang dan jasa di pasar. Harga tersebut berupa harga-harga makanan, pakaian, pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan komoditas lainnya yang akan dibeli konsumen untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Sekian banyak komoditas yang diperhitungkan dapat digolongkan pada empat golongan, yaitu sandang, pangan, papan dan keperluan barang jasa lainnya.

## 2.4 Nilai Tukar Rupiah

Menurut Todara (2004:73), nilai tukar suatu mata uang adalah suatu patokan dimana Bank Sentral negara yang bersangkutan bersedia melakukan transaksi mata uang setempat dengan mata uang asing di pasar - pasar valuta asing yang telah di tentukan. Menurut Puspoprano (2014) nilai tukar adalah, harga dimana mata uang suatu negara dipertukarkan dengan mata uang negara lain. Sementara itu, Sukirno (2014) menyatakan bahwa, kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs valuta asing dapat juga di definisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang di butuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Terdapat dua jenis nilai tukar yaitu nilai tukar nominal (*nominal exchange rate*) dan nilai tukar riil (*realexchange rate*). Nilai tukar nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Sedangkan nilai riil adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar barang dan jasa dari negara lain.

Dalam Teori Penawaran Uang (*Money Supply*) Pengertian uang dalam konteks penawaran uang didefinisikan sebagai bentuk peredaran uang yang diakibatkan berlakunya fungsi uang sebagai satuan penyimpan nilai, alat, pertukaran, dan satuan penyimpan kekayaan (Cargill, 1991) fluktuasi uang beredar didasarkan pada motif masyarakat untuk menjalankan ketiga fungsi



uang tersebut. Nilai mata uang juga dapat ditentukan bagaimana masyarakat menjalankan ketiga fungsi uang tersebut. Teori penawaran uang menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya uang beredar dan dampaknya dalam suatu perekonomian dalam suatu perekonomian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penawaran uang disebabkan adanya aktivitas ekonomi masyarakat dalam menjalankan fungsi uang sebagai satuan penyimpan nilai. Alat pertukaran dan satuan penyimpan kekayaan. Nilai tukar rupiah atau sering disebut dengan kurs valuta asing (*foreign exchange rate*) adalah jumlah mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu nilai mata uang asing. Ketika nilai tukar mengalami depresiasi akan mengakibatkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat akan mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang dan jasa akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat secara umum. Hal tersebut akan secara langsung mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi.

Pengukuran nilai tukar rupiah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tukar Rupiah} = \text{Nilai Kurs Jual} - \text{Nilai Kurs Beli}$$

## 2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Waluyo,2003:275) pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa tertentu di daerah pabean oleh pengusaha tertentu. Pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan namanya merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah (*added value*) dari suatu barang atau jasa dalam sebuah proses transaksi. Pengertian dari nilai tambah sebagaimana dimaksud, salah satunya diberikan oleh Tait (1988), yaitu nilai tambah adalah nilai yang dihasilkan oleh produsen yang ditambahkan kepada bahan baku atau pembelian (termasuk tenaga kerja) sebelum menjual produk atau jasa yang baru atau yang telah diolah. Ebrill, *et al* (2001) menyatakan, PPN secara umum tidak ditujukan untuk menjadi pajak terhadap nilai tambah namun biasanya ditujukan sebagai suatu pajak atas konsumsi. Selanjutnya Schenk dan Oldman (2001) menyatakan dalam parktiknya, pajak atas konsumsi cenderung menjadi pajak atas transaksi.



### 3. METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, karena tujuan penelitian ini adalah meneliti hubungan sebab akibat antara dua variabel, yaitu variabel independen (inflasi dan nilai tukar rupiah) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). Penelitian ini dilakukan di Kantor KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Data yang digunakan adalah data bulanan dengan periode amatan Januari 2015 sampai dengan Desember 2019.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data inflasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui *situs* [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), data nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan diperoleh melalui *situs* [www.ortax.org](http://www.ortax.org) dan dengan mendatangi Kantor KPP untuk memperoleh data realisasi penerimaan PPN.

Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi program SPSS. Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Variabel Dependen (Penerimaan PPN)
- A = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien
- X1 = Variabel Independen (Inflasi)
- X2 = Variabel Independen (Nilai Tukar Rupiah)
- X3 = Variabel Independen (Jumlah PKP)
- e = Error

#### 3.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah tipe variabel menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain (Indriantoro dan Supomo, 2002:63). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

##### a. Inflasi (X1)

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga keseluruhan (Case dan Fair, 2004:58). Menurut Murni (2006:41), laju inflasi adalah laju tingkat harga umum dari tahun ke tahun dan biasanya diikuti dengan kenaikan harga pada tahun tertentu dari





tahun sebelumnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau (*consumer price index-CPI*) mengukur biaya sekelompok barang dan jasa di pasar. Laju atau tingkat inflasi dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Laju inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{(t-1)}}{\text{IHK}_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK<sub>t</sub> = Indeks Harga Konsumen tahun x

IHK<sub>(t-1)</sub> = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

#### b. Nilai Tukar Rupiah (X2)

Menurut Murni (2006:244), nilai tukar (*exchange rate*) atau disebut juga kurs valuta asing (*foreign exchange rate*) adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Menurut Mankiw (2007: 128-135), kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara, sedangkan kurs riil adalah harga relatif dari barang-barang diantara dua negara. Rumus untuk menghitung kurs riil terdiri dari kurs riil untuk barang tunggal dan kurs riil untuk kelompok barang yang lebih luas:

##### 1). Kurs riil untuk barang tunggal

$$\text{Kurs Riil} = \frac{\text{Kurs Nominal} \times \text{Harga Barang Domestik}}{\text{Harga Barang Luar Negeri}}$$

##### 2) Kurs riil untuk kelompok barang yang lebih luas

$$\epsilon = e \times (P/P^*)$$

##### 3) Kurs Nominal

$$e = \epsilon \times (P^*/P)$$

Keterangan:

€ = Kurs Riil

e = Kurs Nominal

P/P\* = Rasio Tingkat Harga

P = Tingkat Harga Luar Negeri (Dollar)

P\* = Tingkat Harga Domestik

#### Variabel Dependen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Penerimaan PPN (Y)

Data penerimaan PPN yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan PPN Kanwil DJP Pekanbaru Senapelan per bulan pada Kanwil DJP Pekanbaru Senapelan Januari 2015 sampai dengan tahun Desember 2019.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel – variabel penelitian dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata – rata (*mean*) dan standar deviasi.

**Tabel 2.**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Inflasi	60	-.45	.97	.2608	.31586
Kurs	60	12562.00	15151.00	1.3648	538.92632
Ppn	60	11236795670	64826275363	35869023138	1.1341348886. 56
Valid N (listwise)	60				

Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) memiliki nilai tertinggi Rp 64,826 triliun sedangkan nilai terendah sebesar 11,236 triliun. Inflasi dan nilai tukar rupiah memiliki nilai tertinggi sebesar 97% dan Rp 15.151 sedangkan nilai terendah sebesar -45%. dan 97%.

### 4.2 Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

**Tabel 3.****Hasil Uji Normalitas Data**

		INFLASI	KURS	Penerimaan PPN
N		60	60	60
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.2608	1.3648E4	3.5869E10
	Std. Deviation	.31586	5.38926E2	1.13413E10
Most Extreme Differences	Absolute	.076	.105	.088
	Positive	.076	.105	.088
	Negative	-.050	-.044	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.591	.817	.681
Asymp. Sig. (2-tailed)		.876	.518	.743

Sumber: Data Olahan SPSS, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel - variabel yang diteliti seluruhnya memiliki tingkat signifikansi yang lebih dari 0,05. berdasarkan atas hasil uji normalitas menunjukkan bahwa : (1) Nilai signifikan data Inflasi sebesar 0,876 lebih besar dari signifikan 0,05. (2) Nilai signifikan data Nilai Kurs sebesar 0,518 lebih besar dari signifikan 0,05. (3). Nilai signifikan data Penerimaan PPN sebesar 0,743 lebih besar dari signifikan 0,05. oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data seluruh variabel telah terdistribusi secara normal.

#### 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas, dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi.

**Tabel 4.**  
**Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-5.800E10	3.204E10		1.810	.076		
INFLASI	1.582E10	4.001E9	.441	3.954	.000	1.000	1.000
KURS	6.575E6	2.345E6	.312	2.804	.007	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

**Sumber : Data Olahan SPSS, 2020**

Berdasarkan hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak adanya variabel bebas yang menunjukkan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, dengan nilai VIF untuk masing - masing variabel bebas bernilai 1. jadi tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Apabila nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki gejala multikolinearitas.

#### 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi adanya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 5.****Uji Heteroskedastisitas****Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.745E9	1.871E10		-.093	.926
INFLASI	3.246E9	2.335E9	.181	1.390	.170
KURS	623209.315	1.369E6	.059	.455	.651

a. Dependent Variable: ABS\_RES

**Sumber : Data Olahan SPSS**

Berdasarkan hasil output dapat dilihat bahwa nilai signifikansi antara Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah sebagai variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

**4.5 Hasil Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dibandingkan dengan tabel Durbin Watson ( $d_l$  dan  $d_u$ ). Kriteria jika  $d_u < d$  hitung  $< 4 - d_u$  maka tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 6.****Uji Autokorelasi****Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.541 <sup>a</sup>	.292	.267	9.70719E9	2.031

a. Predictors: (Constant), KURS, INFLASI

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

**Sumber : Data Olahan SPSS, 2020.**

Berdasarkan hasil uji autokorelasi untuk hubungan variable independen terhadap variable intervening, diperoleh nilai  $d$  hitung (Durbin Watson) dalam model regresi ini sebesar 2,031 dan terletak antara  $dU$  dan  $4-dU = 1.6518 < 2.031 < 2.3482$ . Dikarenakan nilai uji autokorelasi terletak diantara  $dU$  dan  $(4-dU)$  maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.6 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabilitas variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

**Tabel 7****Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.541 <sup>a</sup>	.292	.267	9.70719E9	2.031

**Sumber: Data Olahan SPSS, 2020**

Uji koefisien determinasi (Adjusted R Square) menunjukkan seberapa besar variabel independen (inflasi dan nilai tukar rupiah) dapat menjelaskan variabel dependen (Penerimaan PPN). Hasil output SPSS pada tabel menunjukkan bahwa nilai koefisien *Adj R Square* sebesar 0,267 atau sebesar 26,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen (inflasi dan nilai tukar rupiah) terhadap variabel dependen (Penerimaan PPN) adalah

sebesar 26,7%. sedangkan sisanya ( $100\% - 26,7\% = 73,3\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti ekstensifikasi Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak dan lain sebagainya.

### Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen untuk melihat kebermaknaan masing-masing variabel independen dalam model regresi yang diperoleh menggunakan uji t.

**Tabel 8**  
**Hasil Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.800E10	3.204E10		-1.810	.076
	INFLASI	1.582E10	4.001E9	.441	3.954	.000
	KURS	6.575E6	2.345E6	.312	2.804	.007

a. Dependent Variable: PPN

**Sumber: Data Olahan SPSS, 2020**

### Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPN

Hasil uji t pada tabel 8, didapat t hitung untuk variabel inflasi sebesar 3,954 dengan tingkat signifikansi 0,005 (lebih kecil dari 0,005), Nilai  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,6715, sehingga dapat diketahui bahwa  $t_{\text{hitung}}$  lebih besar dari  $t_{\text{tabel}}$  ( $3,954 > 1,6715$ ). oleh karena tingkat signifikansi di bawah 0,05 dan  $t_{\text{hitung}}$  lebih besar dari  $t_{\text{tabel}}$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN sehingga hipotesis H1 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Salawati (2008), Nuraini dwi (2008), Almira, Kadarisman, dan Bayu (2016) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Secara teori, dasar pengenaan PPN adalah harga perolehan dari BKP/JKP, sehingga jika inflasi terus meningkat berarti harga - harga juga meningkat. Selain itu, kita tahu bahwa tarif yang



berlaku terhadap PPN adalah tarif sepadan yaitu 10 % dari harga perolehan. Hal ini yang menyebabkan inflasi sangat berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Sebagai contoh, jika sebelum terjadi inflasi harga sebuah BKP "X" adalah Rp. 1000.000, maka PPN yang dikenakan adalah Rp.100.000, namun apabila bulan berikutnya terjadi inflasi yang menyebabkan harga BKP "X" naik menjadi Rp.1.100.000, maka PPN yang harus di bayar oleh pembeli adalah Rp. 110.000 sehingga Penerimaan PPN juga meningkat sebesar Rp. 10.000, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

### **Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN**

Hasil uji t pada tabel di atas, di dapat t hitung untuk variabel Nilai Tukar Rupiah sebesar 2,804 dengan tingkat signifikansi 0,007 (lebih kecil dari 0,05). oleh karena tingkat signifikansi di bawah 0,05 dan nilai t<sub>hitung</sub> lebih besar dari t<sub>tabel</sub> (2,804 > 1,6715), maka dapat di simpulkan bahwavariabel nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN sehingga hipotesis H2 diterima. Nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap Penerimaan PPN karena nilai tukar rupiah bisa mempengaruhi harga BKP/JKP, terutama BKP/JKP yang membutuhkan barang modal dari luar negeri. Hal ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat yang selanjutnya akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan PPN. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan kecenderungan peningkatan konsumsi rumah tangga tercermin pada beberapa indikator, seperti konsumsi listrik, penjualan kendaraan bermotor dan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri dan PPN impor.

## **5. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Semakin tinggi inflasi dan nilai tukar rupiah maka penerimaan juga akan semakin tinggi. Periode amatan dalam penelitian ini dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2019 dan hanya di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, sehingga disaran untuk penelitian selanjut menggunakan tahun amatan yang panjang dan memperluas area penelitian. Penelian





selanjutnya juga diharapkan menambah variabel untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah Anti Aprilianti, Siska P, Yudawati dkk, 2018. Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013 - 2016). *Jurnal Ekonomi. Majalaya*. Vol 19 No. 1 (2017).
- Erly Suandy, 2009, *Hukum Pajak, edisi 4*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Febrianto, Yohanes Lantrua, 2017. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi. Yogyakarta*. Vol 3. (2017).
- Fitri Apriyanthi, 2017. *Pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Studi kasus pada kantor wilayah DJP Jawa Barat Tahun 2011-2015)*. Skripsi. Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hidayatul Mualifah, 2019. *Pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, jumlah pengusaha kena pajak dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN)*. Skripsi. S1. Kudus. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Murni, Asfia. 2006. *Ekonomika Makro*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Muhammad arifin, 2015. Pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. *Jurnal Ekonomi. Banten*. Vol (2015).
- Puspitha, Putu Vilia dan Ni Luh Supadmi. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pada Penerimaan PPN ( Studi Kasus pada Kantor



- Pelayanan Pajak se -Bali). *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 22.2: 1530-1556, ISSN: 2302-8556, Universitas Udayana.
- Puspoproto, Sawaldjo. 2014. *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan*. Jakarta:Pustaka Lp3es Indonesia.
- Rochmat, Soemitro. 2003. *Pajak Bumi & Bangunan*. Bandung: Refika.
- Renata, Almira Hernata, Hidayat, Kadarisman dan Kaniskha Bayu. 2016. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I ). PS Perpajakan, *Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*. Jurnal Perpajakan. Volume 9 nomor 1.
- Bruce, Doug dan Charron, Lucie. (2008). *Tax Compliance Burden: The Canadian Perspective*. 2008 International Council for Small Business World Conferences.
- Edelweis, Judith Berliyanti V. (2011). Pengaruh Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak-Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung). Tesis. Universitas Indonesia.
- Gunadi. (2002). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Lai, Ming Ling and Arifin M.,A. (2011). *Small Business Enterprises And Taxation: A Case Study Corporate Clients Of A Tax Firm*. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. Volume 15. Special Issue Number 1.
- Oentari, Arabela dan Mangoting, Yenni. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Universitas Kristen Petra.
- Partomo, Tiktik Sartika. (2004). *Usaha Kecil Menengah dan Koperasi*. *Working Paper Series* No. 9. Universitas Trisakti.
- Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Richardson, G. (2006). *Determinants of tax Evasion: A Cross Country Investigation* *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 15, 150-169.



- Roseline, Riessa. (2012). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak. Universitas Brawijaya.
- Siwiyati, Kresna. (2009). Pengaruh Penetapan Hak Legal dan Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta). Tesis. Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2002). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat Undang – Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Venter, JMP dan Clercq, B de. (2007). *A three-sector comparative study of the impact of taxation on small and medium enterprises. Meditari Accounting Research*. Vol 15, No. 2. 2007: 131-151.
- Widodo, Widi dan Djefris, Dedy. (2008). Taxpayer Bill Of Rights – Apa yang perlu kita ketahui tentang hak-hak Wajib Pajak?. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Widi dkk. (2010). Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.